

WACANA PENDAFTARAN KEBAYA SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA DUNIA

25

Fieka Nurul Arifa

Abstrak

Gerakan kampanye "Kebaya Goes to UNESCO" ramai disuarakan akhir-akhir ini. Gerakan ini menjadi langkah awal untuk mendukung pengakuan kebaya sebagai warisan budaya takbenda dunia dari Indonesia. Tulisan ini mengurai tentang urgensi pendaftaran kebaya di UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia dan persiapan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Keistimewaan kebaya bagi bangsa Indonesia menjadikannya penting untuk dicatatkan dalam warisan budaya takbenda dunia. Selain itu, perlindungan secara internasional dirasa penting agar kebaya tetap lestari sebagai jati diri bangsa Indonesia dan dapat lebih dikenal secara luas. Namun, pendaftaran tersebut memerlukan langkah yang panjang, dibutuhkan kajian mendalam, serta persiapan yang matang. Komisi X DPR RI perlu mendorong kerjasama dan kolaborasi pemerintah dengan pihak terkait untuk melengkapi persyaratan dan mengawal proses pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, mendesak dilakukannya kajian mendalam mengenai kebaya, menetapkan Hari Berkebaya Nasional, serta mengenalkan dan memperkuat kebaya sebagai busana khas perempuan Indonesia melalui diplomasi budaya ke berbagai negara.

Pendahuluan

Sejak pertengahan tahun 2022, gerakan kampanye "Kebaya Goes to UNESCO" ramai disuarakan di linimasa sosial media. Gerakan ini berupaya mengajak para perempuan Indonesia untuk mengenakan kebaya dalam aktivitas sehari-hari, terutama ketika berada di ruang publik. Gerakan ini kian marak bahkan meluas hingga ke luar negeri. Para perempuan Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat,

khususnya di Washington DC, menggelar parade 'Cantik Berkebaya' di kawasan National Mall, pusat kota Washington DC, 7 Agustus 2022. Di dalam negeri, berbagai event untuk mengkampanyekan "Kebaya Goes to UNESCO" juga dilakukan. Misalnya kampanye "Kebaya Goes to UNESCO" dalam bentuk parade kebaya yang dilakukan sejumlah perempuan Indonesia di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 6 November 2022. Kemudian kampanye Perempuan



Berkebaya Indonesia (PBI) di Alun-Alun Pancasila, Kota Salatiga, 20 November 2022. Gerakan kampanye "Kebaya Goes to UNESCO" sekaligus menjadi langkah awal untuk mendukung kebaya agar bisa diakui sebagai warisan budaya takbenda dunia dari Indonesia, menyusul batik yang sudah mendapat pengakuan The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sejak 2 Oktober 2009.

Keinginan agar kebaya diakui UNESCO sudah dinyatakan sejak tahun 2017. Melalui Gerakan 1.000 Perempuan Berkebaya pada 3 Maret 2017, PBI mendorong usulan kebaya ke UNESCO bersamaan dengan usulan Hari Berkebaya Nasional (ramai.id, 29 Oktober 2022). PBI merupakan satu dari 26 organisasi pecinta budaya yang diundang pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam pertemuan sosialisasi pendaftaran kebaya ke UNESCO. Usulan tersebut kemudian dibahas kembali dalam Kongres Berkebaya Nasional pada April 2021 (ramai.id, 29 Oktober 2022). Upaya ini mengalami kemajuan. Pada 16 November 2022, Komisi X DPR RI bersama Kemendikbudristek, serta komunitas-komunitas yang mempromosikan pemakaian kebaya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas persiapan pendaftaran kebaya ke UNESCO untuk diakui sebagai salah satu warisan budaya takbenda dunia. Tulisan ini mengkaji urgensi pendaftaran kebaya di UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia dan persiapan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia.

Urgensi Pendaftaran Kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia

Menurut Kamus Mode (2011: 113), kebaya adalah pakaian tradisional wanita Indonesia berupa blus atau atasan berlengan panjang, dengan bukaan di depan. Pemakaian kebaya mulanya hanya dipadukan dengan kain batik maupun songket sebagai bawahan. Seiring perkembangan zaman, kebiasaan berkebaya dengan kain mulai terganti dengan pilihan bawahan yang lebih modern, seperti rok atau celana yang dianggap lebih praktis.

Bagi perempuan Indonesia, kebaya adalah busana yang khas dan sarat makna. Kebaya memiliki berbagai nilai filosofis dan pesan yang mengingatkan masa perjuangan emansipasi wanita Indonesia. Kebaya dianggap paling ideal untuk mencerminkan keanggunan wanita Indonesia. Kebaya memiliki keistimewaan, di antaranya varian pola dan model, sehingga tidak kaku harus mencerminkan kedaerahan tertentu, bisa dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, mudah didapat, mudah perawatannya, serta memiliki unsur etika dan estetika berbusana (rri.co.id, 15 November 2022). Selain memiliki fungsi estetika, kebaya juga memiliki fungsi sosial agar wanita berpakaian rapi, pantas, dan senantiasa menjaga kehormatannya. Dalam perkembangannya, kebaya menjadi *cultural display* bangsa Indonesia yang dapat dikenakan dalam berbagai acara resmi seperti wisuda, pernikahan, pesta, serta acara resmi kenegaraan. Keistimewaan kebaya bagi bangsa Indonesia menjadi salah satu alasan bahwa kebaya layak diajukan sebagai warisan budaya ke UNESCO, terlebih sebelum diakui negara lain sebagaimana halnya batik yang sempat diakui Malaysia sebelum akhirnya UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan asli Indonesia.

Pengusulan pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya ke UNESCO termasuk dalam kategori warisan budaya takbenda. Berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 yang disahkan dengan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan UNESCO *Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), warisan budaya takbenda sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya terkait yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu dapat diakui sebagai bagian dari warisan budaya takbenda. Warisan budaya takbenda ditransmisikan dari generasi ke generasi, dan terus-menerus diciptakan kembali oleh komunitas sebagai respons terhadap lingkungan, serta interaksi dengan alam dan sejarah yang memberi rasa identitas berkelanjutan untuk menghargai keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Warisan budaya takbenda diwujudkan, antara lain dalam ranah: (a) tradisi dan ekspresi lisan; (b) seni pertunjukan; (c) praktik sosial, ritual dan acara perayaan; (d) pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta; dan (e) kerajinan tangan tradisional.

Kebaya yang merupakan hasil dari keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional perlu dipertimbangkan untuk dicatatkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, pencatatan ini ditujukan untuk memastikan visibilitas yang lebih baik dan kesadaran akan signifikansi warisan budaya takbenda, serta untuk mendorong dialog saling menghormati keanekaragaman budaya. Dengan demikian, dimasukkannya kebaya dalam daftar nominasi warisan

budaya takbenda ke UNESCO memberikan manfaat yang berarti bagi bangsa Indonesia. Upaya ini menjadi wujud kontribusi Indonesia dalam kebudayaan dunia. Dengan pengakuan dunia, kebaya tidak hanya dikenal lebih luas, tetapi juga mendapat jaminan pengamanan internasional untuk memperkuat perlindungan kelestarian kebaya sebagai warisan budaya dunia.

Persiapan yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Kebutuhan memasukkan kebaya sebagai warisan budaya takbenda ke UNESCO telah disadari pemerintah Indonesia. Pada akhir tahun 2021, pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk pengajuan kebaya sebagai warisan budaya takbenda secara *multination*. Meskipun pada awalnya setuju dengan pengajuan secara *multination*, tetapi dalam perjalanannya, organisasi-organisasi pecinta budaya mendorong kebaya harus didaftarkan Indonesia sebagai *singlenation* karena meyakini kebaya adalah warisan asli Indonesia (ramai.id, 29 Oktober 2022). Pengajuan kebaya secara *multination* dikhawatirkan dapat mengakibatkan bias budaya, di mana asal dari kebaya akan dicatatkan berasal dari negara-negara yang mengajukan, sehingga akan menurunkan semangat dan kebanggaan masyarakat Indonesia dalam berkebaya. Saat ini, perihal pengajuan nominasi kebaya apakah secara *singlenation* atau *multination* masih dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Menurut Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, kebaya bisa didaftarkan ke UNESCO mulai Maret 2023. Sesuai prosedur,

pendaftaran akan dibahas dua tahun kemudian, yakni pada 2025, jika diajukan sebagai *singlenation* (Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, 2022), mengingat Indonesia telah mendaftarkan jamu pada awal tahun ini. Sejauh ini, pengajuan kebaya masih dalam tahap pembahasan secara internal dan pengumpulan dokumen-dokumen penyerta (*dossier*).

Untuk dapat menominasikan kebaya ke dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO, lima syarat harus dipenuhi (Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, 2022). *Pertama*, kebaya harus sejalan dengan Pasal 2 Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Mengacu pada pasal tersebut, pemerintah memastikan bahwa kebaya telah sesuai dan dapat dinominasikan sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. *Kedua*, kebijakan-kebijakan pemerintah harus bisa menjamin peningkatan visibilitas kebaya setelah didaftarkan sebagai warisan budaya takbenda. Peningkatan visibilitas kebaya ditandai dengan komitmen pemerintah melalui berbagai upaya yang dilakukan. *Ketiga*, ada upaya untuk melindungi dan mempromosikan kebaya. Untuk itu, kerja sama dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk mengampnyekan kebaya sebagai identitas bangsa Indonesia. *Keempat*, kebaya dipakai secara luas oleh komunitas, kelompok, atau individu yang bersangkutan dengan kebaya. *Kelima*, sebelum diusulkan masuk ke dalam daftar UNESCO, kebaya harus masuk ke dalam warisan sejarah nasional terlebih dahulu.

Pemakaian kebaya secara luas di berbagai wilayah Indonesia telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Meskipun sempat tergerus

arus modernisasi, namun upaya untuk memakai kebaya secara luas di ruang publik kembali digalakkan, salah satunya melalui kampanye "Kebaya Goes to UNESCO." Sebagai busana tradisional, kebaya tidak hanya merefleksikan identitas personal, gender, dan kelas sosial, tetapi juga identitas multikultural perempuan Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno telah memilih kebaya dan kain batik sebagai busana perempuan Indonesia. Ketika itu, kebaya menjadi "gaya nasional" Indonesia yang baru merdeka sekaligus menyatukan heterogenitas budaya Indonesia. Sebagai busana nasional, sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, kebaya dipopulerkan oleh ibu negara yang merepresentasikan perempuan Indonesia di ranah nasional dan internasional (Moersid, 2013). Pasca kemerdekaan, pakar mode dan kebudayaan menetapkan kebaya sebagai busana nasional Indonesia dalam Lokakarya pada tahun 1978 dengan pertimbangan filosofi, sejarah yang panjang, hingga estetika (www.cnnindonesia.com, 19 Agustus 2019).

Selain harus memenuhi lima hal yang dipersyaratkan, harus ditentukan pula langgam (model) mana yang akan didaftarkan dan dari provinsi mana kebaya tersebut berasal. Kebaya di berbagai daerah memiliki ciri khas masing-masing. Setidaknya ada empat langgam kebaya Indonesia, yaitu kutubaru, kartini, kebaya encim, dan kebaya noni. Penggunaan kebaya dilengkapi atribut pelengkap disesuaikan dengan keragaman budaya setempat dengan tetap mengikuti pakemnya. Dalam hal ini, komunitas adat dan pemerintah daerah perlu menunjukkan perannya dengan mengusulkan penominasian kebaya ke UNESCO, yaitu melalui Kemendikbudristek. Kemendikbudristek, melalui Ditjen Kebudayaan, melakukan identifikasi dan inventarisasi warisan budaya takbenda dengan mencatat,

menetapkan, dan menominasikan warisan budaya takbenda (gln.kemdikbud.go.id, 20 November 2022).

Pemerintah dan pihak terkait perlu berkomitmen untuk melengkapi semua syarat di atas dan segera melakukan kajian menyeluruh mengenai kebaya, termasuk menentukan penominasian secara *singlenation* atau *multination*, serta mempersiapkan seluruh dossier pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Persiapan pendaftaran harus dilakukan sematang mungkin untuk menghindari banyaknya revisi seperti halnya pendaftaran pantun yang lalu.

Komisi X DPR RI mendukung pengajuan kebaya sebagai warisan budaya dunia. Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk: (1) bekerja sama dan berkolaborasi dengan komunitas dan pihak terkait untuk melengkapi persyaratan dan mengawal proses pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO; (2) melakukan kajian mendalam guna memastikan kebaya yang didaftarkan ke UNESCO adalah warisan budaya dunia dari Indonesia; (3) melakukan kajian guna menetapkan Hari Berkebaya Nasional; (4) melakukan diplomasi budaya ke berbagai negara untuk memperkuat kebaya sebagai busana khas perempuan Indonesia sekaligus identitas budaya Indonesia.

Penutup

Kebaya sebagai busana khas perempuan Indonesia sekaligus identitas budaya Indonesia perlu mendapatkan pengakuan dunia sebagai wujud kontribusi Indonesia dalam kebudayaan dunia sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap budaya agar tetap lestari dengan memasukkannya dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Merujuk pada Pasal 2 Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, kebaya telah sesuai

dan dapat dinominasikan sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.

Namun demikian terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk itu, perlu dilakukan persiapan sebaik mungkin dengan melakukan kajian mendalam dan pengumpulan *dossier* pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh UNESCO. Komisi X DPR RI mendukung pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya takbenda dunia. Komisi X DPR RI perlu mendorong kerja sama dan kolaborasi pemerintah dengan pihak terkait untuk melengkapi persyaratan dan mengawal proses pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, mendesak dilakukannya kajian mendalam mengenai kebaya dan menetapkan Hari Berkebaya Nasional, serta mengenalkan dan memperkuat kebaya sebagai busana khas perempuan Indonesia melalui diplomasi budaya ke berbagai negara.

Referensi

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendiknudristek). (2022). *Inkripsi Warisan Budaya Indonesia di UNESCO*. Paparan Rapat. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI pada 16 November 2022.

Hadisurya, Irma, dan Pambudy, N, M, Jusuf, H. 2011. *Kamus Mode Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

“Jalan Kebaya Terpilih Jadi Busana Nasional Indonesia”, 18 Agustus 2019, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190815162917-277-421669/jalan->

kebaya-terpilih-jadi-busana-nasional-indonesia, diakses 22 November 2022.

Moersid, Ananda. 2013. "Re-Invensi Batik dan Identitas Indonesia dalam Arena Pasar Global." *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.1(2).

Naskah Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), 29 September hingga 17 Oktober 2003, <https://ich.unesco.org/en/convention>, diakses 15 November 2022.

"RRI Dukung Kebaya Goes To Unesco", 15 November 2022, <https://rri.co.id/surabaya/hiburan/88076/rri-dukung-kebaya-goes-to-unesco>, diakses 15 November 2022.

"Viral Goes to UNESCO Inilah Alasan Kebaya Diajukan Jadi Warisan Budaya Didukung Ibu Negara, Dian Sastrowardoyo Hingga Susi Pudjiastuti", 29 Oktober 2022, <https://ramal.id/viral-goes-to-unesco-inilah-alasan-kebaya-diajukan-jadi-warisan-budaya-didukung-ibu-negara-dian-sastrowardoyo-hingga-susi-pudjiastuti/>, diakses 15 November 2022.

"Warisan Budaya takbenda", <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/>, diakses 20 November 2022.



Fieka Nurul Arifa
fieka.arifa@dpr.go.id

Fieka Nurul Arifa, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2011 dan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama Kepakaran Pendidikan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah Kepulauan" (2018), "Mitigasi Bencana pada Sektor Pendidikan Formal" (2018), "Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Karakter" (2019), "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)" (2019), dan "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.